

LAPORAN AKHIR



**MENELITI DAMPAK EKONOMI KORUPSI: APAKAH ADA
PERBEDAAN ANTARA NEGARA TERBERSIH DAN PALING KORUP
SEBELUM DAN SELAMA COVID-19?**

**LESTARI AGUSALIM
MUHAMMAD ILHAM ALFIANSYAH
PUGUH PRASETYOPUTRA
RIKO NOVIANTORO**

UNIVERSITAS TRILOGI

2025

ABSTRAK

Relevansi penelitian ini bermula dari kebutuhan untuk memahami dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai kelompok negara, khususnya sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi antara negara-negara dengan tingkat korupsi terendah dan tertinggi, baik sebelum maupun selama pandemi. Dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model efek tetap dari tahun 2012 hingga 2020 dan mencakup 159 negara, penelitian ini mendukung teori "*sand the wheels*", yang menyatakan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi antara negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi dan rendah, baik sebelum maupun selama pandemi COVID-19. Selain itu, belanja per kapita dan kualitas regulasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penanaman modal asing (FDI) dan keterbukaan perdagangan memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai kelompok negara dan periode. Untuk mengurangi dampak negatif korupsi, kebijakan antikorupsi yang ketat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: COVID-19, korupsi, *sand the wheels*, institusi, pertumbuhan ekonomi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan akhir penelitian ini. Penelitian berjudul "Meneliti Dampak Ekonomi Korupsi: Apakah Ada Perbedaan Antara Negara Terbersih dan Paling Korup Sebelum dan Selama COVID-19?" ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara selama periode tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi tanpa perbedaan signifikan antara negara dengan tingkat korupsi tinggi maupun rendah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kebijakan antikorupsi yang ketat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan peneliti dalam upaya mengurangi dampak negatif korupsi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Jakarta, 09 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1 PENDAHULUAN	1
2 METODE PENELITIAN	7
3 HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4 PENUTUP	26
DAFTAR PUSTAKA	28

1 PENDAHULUAN

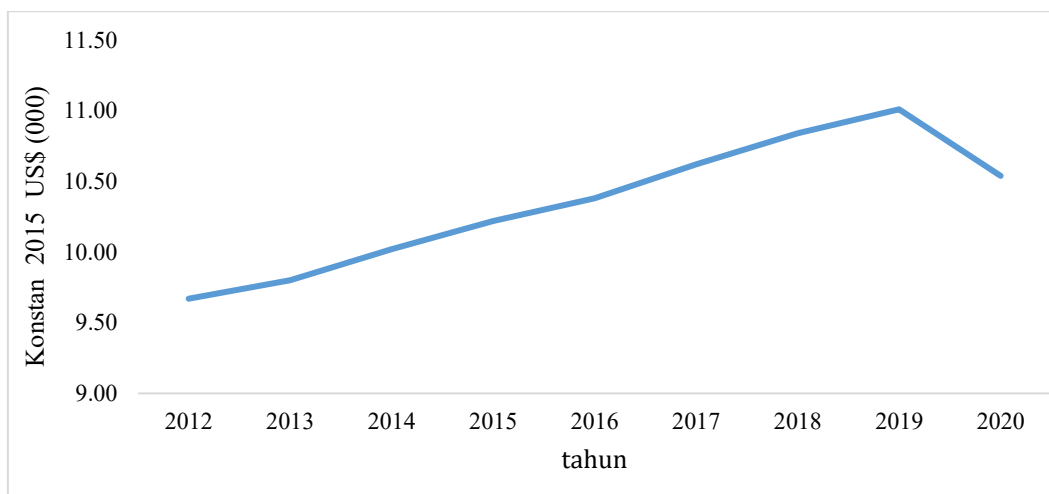
Globalisasi dipercaya memiliki potensi untuk membawa manfaat yang sangat besar bagi mereka yang berada di negara berkembang dan negara maju. Globalisasi diharapkan bisa meningkatkan standar hidup di seluruh dunia. Negara-negara miskin dapat mengakses pasar luar negeri sehingga mereka dapat menjual barang, memungkinkan masuknya investasi asing, dan membuka perbatasan agar orang dapat bepergian ke luar negeri untuk berpendidikan, bekerja, dan mengirim penghasilan ke rumah untuk membantu keluarga dan mendanai bisnis baru (Stiglitz, 2007). Shahbaz *et al.*, (2018) mengungkapkan bahwa globalisasi membuat keterbukaan perdagangan, pengembangan keuangan, pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan. Globalisasi membuat setiap negara berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi melalui perdagangan luar negeri, investasi, industrialisasi dan urbanisasi.

Rode dan de Viteri (2018) berpendapat bahwa globalisasi menyebabkan perubahan struktural dunia modern. Hal ini mempengaruhi penyesuaian sistem pemerintahan nasional, perubahan ekonomi, strategi pembangunan politik dan menciptakan saling ketergantungan dunia yang berkelanjutan. Globalisasi ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi asing. Misalnya, efek perdagangan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan transformasi struktural, yang pada akhirnya juga meningkatkan aspek lingkungan. Di satu sisi, konektivitas antar negara meningkatkan transfer teknologi. Di sisi lainnya, pertumbuhan peluang ekspor komoditas di era perdagangan bebas meningkatkan produksi barang dengan biaya lingkungan melalui efek berskala (Ahmed *et al.*, 2019)

Pada tahun 2020, Covid-19 mengakibatkan deglobalisasi di seluruh dunia dan memberikan dampak pembatasan berskala global. Hal itu dilakukan karena penyebaran Covid-19 sangat tinggi. Tercatat pada Desember 2022 sudah terdapat 6,69 juta kasus kematian dan 664 juta total kasus terinfeksi. Amerika Serikat menjadi negara dengan tingkat kasus tertinggi yaitu 79,6 juta kasus terinfeksi dan 970 ribu kasus kematian. Disusul India dengan 43 juta kasus terinfeksi dan 517 ribu kasus kematian, Brazil 29,7 juta kasus terinfeksi dan 658 ribu kasus kematian,

Prancis 23,8 juta kasus terinfeksi dan 138 ribu kasus kematian, serta Britania Raya dengan 20,6 juta kasus terinfeksi dan 164 ribu kasus kematian (*Worldometers*, 2022). Covid-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan. Namun, sektor ekonomi juga terkena imbasnya. Covid-19 membuat sektor manufaktur terganggu karena adanya pembatasan yang membuat pengurangan tenaga kerja, gangguan rantai pasokan dan transportasi, serta penurunan permintaan (Baldwin dan Mauro, 2020). Surico & Galeotti (2020) melihat pembatasan yang dilakukan akibat adanya Covid-19 sebagai penurunan aliran pendapatan. Hal tersebut dikarenakan pembatasan menjadi hambatan pergerakan manusia dan kegiatan ekonomi, yang berdampak terhadap menurunnya aktivitas perekonomian dan menyebabkan penurunan terhadap *Gross Domestic Product* (Produk Domestik Bruto/PDB).

Pada Gambar 1 memperlihatkan perkembangan PDB per kapita. Tanpa adanya Covid-19 PDB per kapita selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 PDB per kapita mencapai US\$11,012.4. Namun, ketika tahun 2020 PDB per kapita mengalami penurunan menjadi 10.542,3 dengan selisih sebesar US\$ 470.1 per tahun.



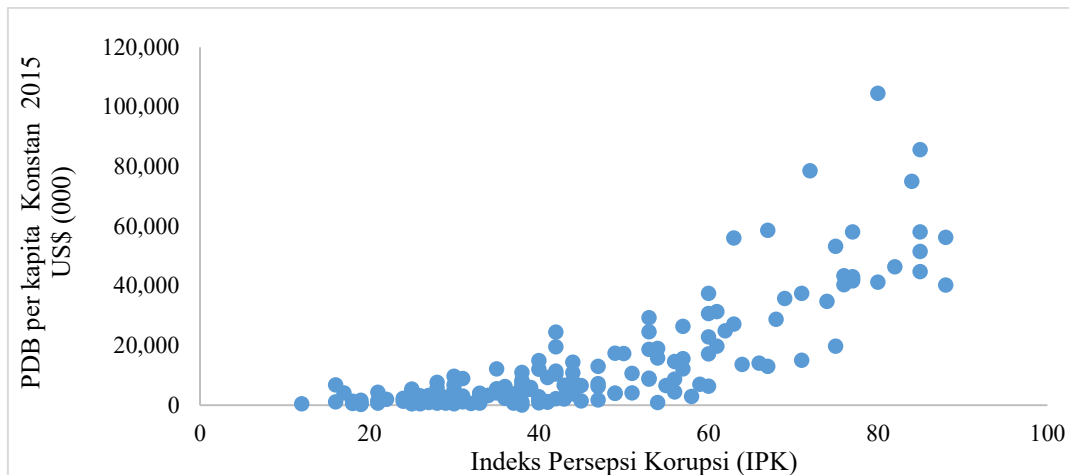
Gambar 1. Perkembangan PDB per kapita dunia (diolah dari data publikasi *world bank*)

Covid-19 menyebabkan resesi ekonomi di seluruh dunia. Tetapi, tidak menurunkan angka korupsi. Karena para koruptor tidak merasa bahwa korupsi merupakan sebuah pelanggaran moral. Mereka merasa malu bukan karena telah melanggar nilai-nilai moral. Akan tetapi, mereka takut dengan hukuman dan ketidaknyamanan yang akan mereka hadapi nantinya (Denisova-Schmidt, 2020).

Banyak negara yang mulai menangani korupsi secara serius agar dapat mencegah serta memberantas korupsi dengan membentuk lembaga anti korupsi. Terdapat lembaga seperti *Transparency International* yang mengawasi tingkat korupsi di seluruh dunia. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi menjadi sebuah permasalahan yang selalu timbul hampir di setiap negara. Telah diperkirakan lebih dari US\$10 miliar atau setara 5 persen PDB dunia setiap tahunnya hilang karena korupsi (*Transparency International*, 2020). Desweni (2017) menerangkan bahwa dampak dari korupsi khususnya pada aspek ekonomi akan menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang.

Wang (2016) menemukan bahwa korupsi menghambat laju pertumbuhan ekonomi di negara China. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Deyshappriy (2015) bahwa korupsi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, semakin damai suatu negara maka masyarakat akan semakin produktif yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di Afrika, dimana korupsi menghambat laju pertumbuhan ekonomi seperti pada penelitian (D'Agostino *et al.*, 2016). Tsanana *et al.*, (2016) juga menemukan bahwa korupsi menghambat laju pertumbuhan PDB per kapita pada negara-negara eropa. Sementara itu, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Huang (2016) pada Korea Selatan. Pada negara tersebut, ditemukan bahwa korupsi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran korupsi yang dilakukan *Transparency International* menggunakan indeks persepsi korupsi (IPK) dengan skala 1-100, angka 0 menunjukkan bahwa negara tersebut sangat korup. Sedangkan, angka 100 adalah negara yang bersih. Pada tahun 2020, *Transparency International* menetapkan 5 negara terbersih, yaitu Selandia Baru dan Denmark dengan nilai IPK sebesar 88, disusul oleh Finlandia, Singapura dan Swedia dengan nilai IPK sebesar 85. Sementara itu, terdapat 5 negara terkorup yaitu Somalia dengan ipk 12, Sudan dengan nilai IPK 16, Haiti dan Congo dengan nilai IPK 18, serta Guinea dengan IPK 19. Dua per tiga negara yang terdaftar dalam laporan berada di bawah angka 50. Tepatnya dengan rata rata angka 43 yang mengindikasikan bahwa lebih banyak negara korup dibandingkan negara bersih di dunia.



Gambar 2. Indikasi hubungan IPK dengan PDB per kapita tahun 2020 (diolah dari data publikasi *World Bank* dan *Transparency International*, 2020)

Jika diamati dengan seksama, pada Gambar 2 variasi PDB memiliki gap yang tidak terlalu besar dibanding negara yang nilai IPKnya di atas 50. Selain itu, terlihat bahwa negara dengan indeks persepsi yang tinggi cenderung memiliki PDB per kapita yang tinggi pula. Hal itu dibuktikan oleh Negara Luxemburg yang memiliki IPK sebesar 80 mempunyai nilai PDB per kapita sebesar US\$ 104529,34. Di sisi lain, Burundi yang mempunyai IPK sebesar 19 hanya mencapai US\$ 270,69 PDB per kapita.

Oleh karena itu, akan dilakukan kajian lebih lanjut mengenai korupsi dan PDB per kapita. Melihat adanya Covid-19 yang sedang menimpa seluruh dunia hingga saat ini, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dampak dari korupsi terhadap PDB per kapita tanpa atau dengan adanya Covid-19 pada 159 negara terkorup dan terbersih. Negara terbersih adalah negara dengan skala IPK 51-100. Sedangkan, negara terkorup mempunyai skala 1-50. Penelitian ini penting dilakukan untuk dapat mengkomparasikan bagaimana pertumbuhan ekonomi di kelompok negara terbersih dan terkorup di dunia baik tanpa atau dengan adanya pandemi Covid-19. Dengan melakukan komparasi tersebut, para pembuat kebijakan pada masing-masing negara dapat mengambil kebijakan yang sesuai untuk mengatasi persoalan korupsi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Terdapat perdebatan bahwa korupsi dianggap sebagai *grease the wheels* (pelumas roda) atau sebagai *sand the wheels* (hambatan roda) dalam roda

pertumbuhan ekonomi. Lui (1985) menganggap bahwa korupsi adalah grease the wheels. Hal itu dikarenakan Korupsi secara efisien dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam antrian administrasi. Suap bisa memberikan birokrat insentif untuk mempercepat proses dalam administrasi yang lamban. Huntington (1968) berpendapat bahwa korupsi membantu mengatasi peraturan birokrasi yang ketat dan mendorong pertumbuhan. Fenomena seperti itu telah diamati sejak tahun 1870. Pada tahun 1880, di Negara Amerika Serikat, terjadi korupsi yang dilakukan perusahaan kereta api, utilitas dan industri menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat. Korupsi dianggap sebagai pelumas dalam roda pertumbuhan ekonomi. Korupsi membantu perusahaan baru dalam menghadapi sulitnya birokrasi (Mendoza et al., 2015). Prosedur yang tidak efektif dari birokrasi dapat diatasi oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh perusahaan swasta dengan para pejabat (Habibov et al., 2017). Bologna dan Ross (2015) menyampaikan bahwa korupsi dapat dilakukan untuk membantu perusahaan dalam mengatasi beban dari peraturan pemerintah, perlindungan nilai terhadap birokrat yang berubah-ubah, mengurangi resiko bisnis serta mempromosikan inovasi. Menurut Son et al., (2020), korupsi dapat menurunkan dampak negatif dari peraturan pemerintah terhadap kewirausahaan. Korupsi dapat menjadi “pelumas” dalam mengatasi kesulitan regulasi, sehingga perusahaan dapat bekerja secara maksimal.

Pendapat berbeda ditunjukkan oleh Kurer (1993) yang menganggap bahwa korupsi adalah sand the wheels dalam roda pembangunan. Pejabat yang korup memiliki insentif untuk menciptakan distorsi lain dalam perekonomian untuk mempertahankan sumber pendapatan gelap mereka. Bardhan (1997) berpendapat bahwa ketidakpastian yang melekat pada kegiatan korupsi membuat mekanisme peningkatan efisiensi menjadi tidak efektif. Kéita dan Laurila (2021) menerangkan bahwa akibat adanya korupsi, tingkat produktivitas suatu perusahaan dapat berkurang. Pengurangan produktivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mauro et al., (2019) mengungkapkan bahwa korupsi dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah. Penurunan pajak disebabkan banyak para pejabat pemerintahan yang mengambil pendapatan pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Korupsi menambah hutang negara. Hal tersebut terjadi karena para koruptor tidak sadar bahwa tindakan mereka memperburuk

keuangan negara (Shittu et al., 2018). Zakharov (2019) menyatakan bahwa korupsi dapat menghambat investasi. Korupsi membuat para investor tidak percaya untuk menginvestasikan uang mereka sehingga mempersulit pertumbuhan ekonomi.

2 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data yang dibutuhkan berasal dari publikasi Transparency International dan World Bank. Periode penelitian dimulai dari tahun 2012-2020 di 159 negara yang telah disurvei oleh Transparency International. Studi literatur diperoleh dari jurnal internasional, buku, dan literatur ilmiah lainnya. Variabel yang digunakan mengadaptasi dari penelitian Sharma & Mitra (2019) dan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Variabel	Keterangan	Satuan
1.	<i>growth</i>	PDB per kapita yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural digunakan sebagai indikator dalam pertumbuhan ekonomi	Konstan 2015 US\$
2.	<i>ipk</i>	IPK digunakan sebagai alat pengukuran korupsi yang diambil melalui <i>Transparency International</i>	0-100
3.	<i>ge_k</i>	Total pengeluaran pemerintah perkapita	US\$
4.	<i>fdi_k</i>	Penanaman modal asing langsung Per kapita. Modal asing langsung berupa jumlah modal ekuitas, reinvestasi pendapatan, modal jangka panjang lainnya, dan modal jangka pendek dan dibagi oleh PDB.	US\$
5.	<i>to</i>	Keterbukaan ekonomi (ekspor + impor) / PDB *100	Persen
6.	<i>rq</i>	Kualitas peraturan pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diukur dalam bentuk skala	-2,5 sampai dengan 2,5
7.	<i>se</i>	Pendaftaran sekolah, menengah (% kotor). Rasio partisipasi kasar untuk sekolah menengah dihitung dengan membagi jumlah siswa yang terdaftar di pendidikan menengah tanpa memandang usia dengan populasi kelompok usia yang secara resmi sesuai dengan pendidikan menengah, dan dikalikan dengan 100 kelompok usia yang secara resmi sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditunjukkan.	Persen

No	Variabel	Keterangan	Satuan
8.	dc	<i>Dummy Covid-19</i>	Tanpa Covid-19 = 0, Dengan Covid-19 = 1
9.	dn	<i>Dummy negara</i>	Negara terbersih = 1, Negara terkorup = 0

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Terdapat beberapa langkah dalam menjawab penelitian meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Analisis dilakukan dengan bantuan *software* stata versi 17. Adapun spesifikasi model yang dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
lnpbd_{it} = & \alpha + \beta_1 ipk_{it} + \beta_2 ipk_{it} dn_{it} + \beta_3 ipk_{it} dc_{it} + \beta_4 ge_k_{it} \\
& + \beta_5 ge_k_{it} dn_{it} + \beta_6 ge_k_{it} dc_{it} + \beta_7 fdi_k_{it} \\
& + \beta_8 fdi_k_{it} dn_{it} + \beta_9 fdi_k_{it} dc_{it} + \beta_{10} to_{it} \\
& + \beta_{11} to_{it} dn_{it} + \beta_{12} to_{it} dc_{it} + \beta_{13} rq_{it} \\
& + \beta_{14} rq_{it} dn_{it} + \beta_{15} rq_{it} dc_{it} + \varepsilon_{it}
\end{aligned}$$

Model ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh interaksi antara variabel indeks persepsi korupsi (ipk), pengeluaran pemerintah per kapita (ge_k), investasi asing langsung per kapita (fdi_k), keterbukaan perdagangan (to), dan stabilitas politik (rq), terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (*growth*), sehingga model dari kedua kategori dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Negara Terbersih

• Tanpa Covid-19

Keterangan: $dn_{it}=1$ (negara terbersih), $dc_{it}=0$ (tanpa Covid-19)

$$\begin{aligned}
lnpdb_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 ipk_{it} + \alpha_2 ipk_{it} dn_{it}(1) + \alpha_3 ipk_{it} dc_{it}(0) + \alpha_4 ge_k_{it} \\
& + \alpha_5 ge_k_{it} dn_{it}(1) + \alpha_6 ge_k_{it} dc_{it}(0) + \alpha_7 fdi_k_{it} \\
& + \alpha_8 fdi_k_{it} dn_{it}(1) + \alpha_9 fdi_k_{it} dc_{it}(0) + \alpha_{10} to_{it} \\
& + \alpha_{11} to_{it} dn_{it}(1) + \alpha_{12} to_{it} dc_{it}(0) + \alpha_{13} rq_{it} \\
& + \alpha_{14} rq_{it} dn_{it}(1) + \alpha_{15} rq_{it} dc_{it}(0) + \varepsilon_{it}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
lnpdb_{it} = & \alpha_0 + (\alpha_1 + \alpha_2) ipk_{it} + (\alpha_4 + \alpha_5) ge_k_{it} + (\alpha_7 + \alpha_8) fdi_k_{it} + (\alpha_{10} + \\
& \alpha_{11}) to_{it} + (\alpha_{13} + \alpha_{14}) rq_{it} + \varepsilon_{it}
\end{aligned}$$

Signifikansi dari $\alpha_3, \alpha_6, \alpha_9, \alpha_{12}$, dan α_{15} menentukan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa atau dengan adanya Covid-19.

Signifikansi dari $\alpha_2, \alpha_5, \alpha_8, \alpha_{11}$, dan α_{14} menentukan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen negara terbersih dan terkorup.

- Dengan Covid-19

Keterangan: $dn_{it}=1$ (negara terbersih), $dc_{it} = 1$ (dengan Covid-19)

$$\begin{aligned} \lnpdb_k_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 ipk_{it} + \alpha_2 ipk_{it} dn_{it}(1) + \alpha_3 ipk_{it} dc_{it}(1) + \alpha_4 ge_{it} \\ & + \alpha_5 ge_{it} dn_{it}(1) + \alpha_6 ge_{it} dc_{it}(1) + \alpha_7 fdi_k_{it} \\ & + \alpha_8 fdi_k_{it} dn_{it}(1) + \alpha_9 fdi_k_{it} dc_{it}(1) + \alpha_{10} to_{it} \\ & + \alpha_{11} to_{it} dn_{it}(1) + \alpha_{12} to_{it} dc_{it}(1) + \alpha_{13} rq_{it} + \alpha_{14} rq_{it} dn_{it}(1) \\ & + \alpha_{15} rq_{it} dc_{it}(1) + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lnpdb_k_{it} = & \alpha_0 + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) ipk_{it} + (\alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6) ge_k_{it} + (\alpha_7 + \alpha_8 + \alpha_9) \\ & fdi_k_{it} + (\alpha_{10} + \alpha_{11} + \alpha_{12}) to_{it} + (\alpha_{13} + \alpha_{14} + \alpha_{15}) rq_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Signifikansi dari $\alpha_3, \alpha_6, \alpha_9, \alpha_{12}, \alpha_{15}, \alpha_{18}$, dan α_{21} menentukan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa atau dengan adanya Covid-19.

Signifikansi dari $\alpha_2, \alpha_5, \alpha_8, \alpha_{11}, \alpha_{14}, \alpha_{17}$, dan α_{20} menentukan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen negara terbersih dan terkorup.

B. Negara Terkorup

- Tanpa Covid-19

Keterangan: $dn_{it}=0$ (negara terkorup), $dc_{it} = 0$ (tanpa Covid-19)

$$\begin{aligned} \lnpdb_k_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 ipk_{it} + \alpha_2 ipk_{it} dn_{it}(0) + \alpha_3 ipl_{it} dc_{it}(0) + \alpha_4 ge_k_{it} \\ & + \alpha_5 ge_k_{it} dn_{it}(0) + \alpha_6 ge_k_{it} dc_{it}(0) + \alpha_7 fdi_k_{it} \\ & + \alpha_8 fdi_k_{it} dn_{it}(0) + \alpha_9 fdi_k_{it} dc_{it}(0) + \alpha_{10} to_{it} \\ & + \alpha_{11} to_{it} dn_{it}(0) + \alpha_{12} to_{it} dc_{it}(0) + \alpha_{13} rq_{it} + \alpha_{14} rq_{it} dn_{it}(0) \\ & + \alpha_{15} rq_{it} dc_{it}(0) + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

$$\lnpdb_k_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 ipk_{it} + \alpha_4 ge_k_{it} + \alpha_7 fdi_k_{it} + \alpha_{10} to_{it} + \alpha_{13} rq_{it} + \varepsilon_{it}$$

Signifikansi dari $\alpha_3, \alpha_6, \alpha_9, \alpha_{12}$ dan α_{15} menentukan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa dan

dengan adanya Covid-19.

Signifikansi dari $\alpha_2, \alpha_5, \alpha_8, \alpha_{11}$, dan α_{14} , menentukan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen negara terbersih dan terkorup.

• Dengan adanya Covid-19

Keterangan: $dc_{it}=0$ (negara terkorup), $dc_{it} = 1$ (dengan Covid-19)

$$\begin{aligned} \ln pdb_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 ipk_{it} + \alpha_2 ipk_{it} dn_{it}(0) + \alpha_3 ipk_{it} dc_{it}(1) + \alpha_4 ge_{it} \\ & + \alpha_5 ge_{it} dn_{it}(0) + \alpha_6 ge_{it} dc_{it}(1) + \alpha_7 fdi_{it} \\ & + \alpha_8 fdi_{it} dn_{it}(0) + \alpha_9 fdi_{it} dc_{it}(1) + \alpha_{10} to_{it} \\ & + \alpha_{11} to_{it} dn_{it}(0) + \alpha_{12} to_{it} dc_{it}(1) + \alpha_{13} rq_{it} + \alpha_{14} rq_{it} dn_{it}(0) \\ & + \alpha_{15} rq_{it} dc_{it}(1) + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln pdb_{it} = & \alpha_0 + (\alpha_1 + \alpha_3) ipk_{it} + (\alpha_4 + \alpha_6) ge_{it} + (\alpha_7 + \alpha_9) fdi_{it} + (\alpha_{10} + \\ & \alpha_{12}) to_{it} + (\alpha_{13} + \alpha_{15}) rq_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Signifikansi dari $\alpha_3, \alpha_6, \alpha_9, \alpha_{12}$, dan α_{15} menentukan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa dan dengan adanya Covid-19.

Signifikansi dari $\alpha_2, \alpha_5, \alpha_8, \alpha_{11}$, dan α_{14} menentukan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen negara terbersih dan terkorup.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dimulai dengan memberikan gambaran mengenai pergerakan variabel yang digunakan yaitu, PDB per kapita, indeks persepsi korupsi, dan variabel ekonomi makro lainnya selama periode 2012-2020. Pemilihan periode tersebut dilatarbelakangi oleh ketersediaan data indeks korupsi tahunan yang berasal dari *Transparency International*. Variabel-variabel tersebut dikelompokkan menjadi negara terbersih dan terkorup berdasarkan penggolongan dari *Transparency International*. Negara dengan nilai skor IPK 0-50 adalah negara terkorup dan negara yang skor IPKnya 51-100 adalah negara terbersih. Pada Tabel 2 Negara Somalia menjadi negara negara dengan peringkat pertama sebagai kategori negara terkorup. Hal menarik terlihat pada nilai skor IPK Negara Somalia yang mengalami peningkatan cukup besar yakni sebesar tiga poin pada masa Covid-19. Selanjutnya, Negara Sudan menjadi negara kedua sebagai negara kedua dalam kategori terkorup. Pada tahun 2019 dan 2020, skor pada negara tersebut menunjukkan angka yang stagnan. Negara Haiti dan Negara Congo berada pada posisi yang sama yaitu peringkat ketiga dengan skor IPK sebesar 18 dan tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2019. Hal serupa juga terjadi pada negara peringkat kelima yaitu Burundi dan Guinea-Bissau. Pada kedua negara tersebut juga terlihat tidak mengalami perubahan skor IPK dan stagnan. Kamboja dan Chad negara dengan peringkat IPK ketujuh juga mengalami hal serupa. Di sisi sebaliknya, Negara Comoros mengalami penurunan yang cukup besar skor IPK. Penurunan dengan skor sebanyak empat poin membuat negara tersebut mengalami penurunan peringkat dari 14 menjadi posisi sembilan pada negara terkorup. Negara Nicaragua menjadi negara peringkat ke-10 pada negara terkorup dengan skor ipk sebesar 22 dengan angka yang tanpa dan dengan adanya Covid-19.

Pada negara terbersih, Negara Denmark dan Selandia Baru merupakan negara dengan peringkat satu sebagai kategori negara terbersih dengan skor 88 yang sebelumnya 87 pada tahun tanpa adanya Covid-19. Disusul oleh, Finlandia, Singapura, Swedia, serta Swiss dengan skor IPK yang sama yaitu 85 sebagai peringkat ketiga. Finlandia merupakan satu satunya negara yang mengalami

penurunan di antara keempat negara tersebut. Pada tahunnya sebelumnya, IPK negara tersebut mencapai angka 86 turun menjadi angka 85 Covid-19. Pada posisi ketujuh, ditempati oleh Negara Norwegia dengan skor IPK mencapai 84 dan terlihat stabil IPK pada negara tersebut baik tanpa Covid-19 maupun saat Covid-19. Negara Belanda menjadi negara yang berada pada posisi delapan dengan skor IPK mencapai 82. Di posisi terakhir, Negara Jerman serta Luxembourg dengan skor IPK mencapai 80 dan tidak ada perubahan baik pandemi maupun saat pandemi. Pada negara terbersih maupun negara terkorup terkecuali Negara Somalia, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akibat adanya Covid-19.

PDB per kapita negara terbersih relatif lebih besar dibanding negara terkorup. Namun, pertumbuhan ekonomi negara terkorup jauh lebih besar dibanding negara terbersih. Pada saat terjadinya pembatasan berskala global akibat Covid-19, pertumbuhan ekonomi hampir di setiap negara mengalami penurunan kecuali Somalia, Congo, dan Burundi. Pembatasan tersebut mengganggu tingkat produktivitas dan menyebabkan resesi ekonomi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

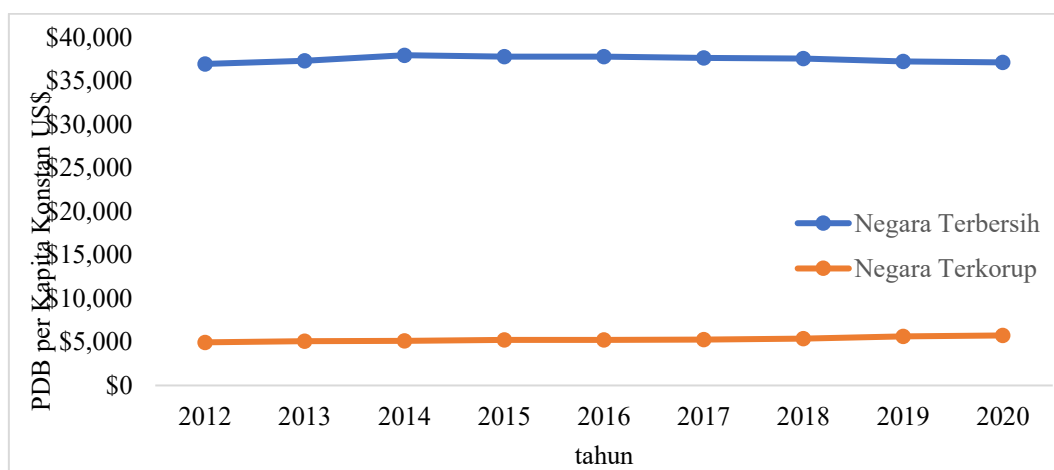
Tabel 2. PDB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi di 10 Negara Terkorup dan Terbersih (diolah dari data publikasi *World Bank* dan *Transparency International* 2020)

NEGARA	2019	2020				
	PDB_K	Pertumbuhan Ekonomi	IPK	PDB_K	Pertumbuhan Ekonomi	IPK
Negara Terkorup						
Somalia	446,85	8,08	9	444,79	2,44	12
Sudan	1.198,52	-2,18	16	1.127,72	-3,62	16
Haiti	1.373,88	-1,68	18	1.311,71	-3,34	18
Congo, Dem. Rep.	512,59	4,38	18	505,35	1,73	18
Guinea-Bissau	650,70	4,50	19	619,29	-2,40	19
Kamboja	1.441,18	7,05	20	1.376,41	-3,10	20
Chad	660,07	3,25	20	634,75	-1,60	20
Comoros	1.284,29	1,76	25	1.255,04	-0,29	21
Nicaragua	1.984,82	-3,78	22	1.922,35	-1,79	22
Negara Terbersih						
Denmark	57.553,11	2,11	87	56.202,21	-2,06	88
Selandia Baru	40.315,51	2,19	87	40.218,42	-1,25	88
Finlandia	46.116,53	1,22	86	44.751,31	-2,30	85
Singapura	61.173,91	1,10	85	58.056,82	-4,14	85
Swedia	53.490,41	1,99	85	51.539,62	-2,94	85
Swiss	88.413,32	1,21	85	85.413,22	-2,39	85
Norwegia	76.005,23	0,75	84	75.017,23	-0,72	84
Belanda	48.424,31	1,96	82	46.327,71	-3,80	82
Jerman	43.311,62	1,06	80	41.259,21	-4,57	80

Luxembourg	108.526	3,28	80	104.529	-1,78	80
------------	---------	------	----	---------	-------	----

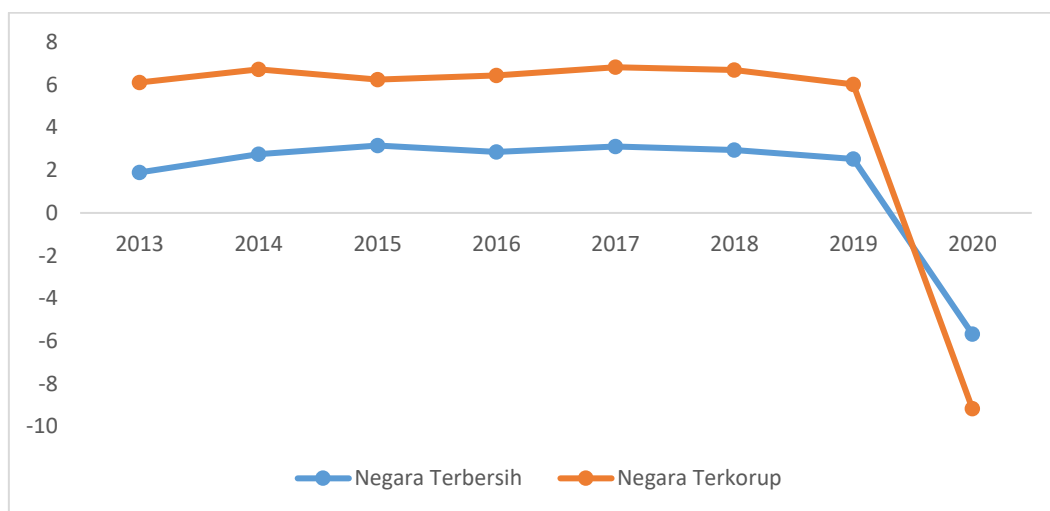
Catatan: Skala IPK adalah 0-100 dimana semakin tinggi IPK, maka negara tersebut semakin bersih. Satuan PDB per kapita adalah US\$

Pembahasan pertama dalam penelitian akan mengacu terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan PDB per kapita sebagai tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi (Popov, 2018). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemudian diiringi dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat (Van den Berg, 2016). Istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dalam perkembangan suatu perekonomian, pada suatu negara tidak memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Malanski & Povia, 2021). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dunia (Urbano *et al.*, 2019). Jika dilihat pada Gambar 3, PDB per kapita negara berkembang cenderung stagnan dan tidak terlihat perkembangan yang signifikan dari tahun 2012-2020. Negara terbersih memperlihatkan hasil sebaliknya yang mempunyai grafik yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Namun, baik negara terbersih maupun negara terkorup mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Akibat dari pembatasan tersebut, membuat penurunan tingkat produksi yang berdampak dari pembatasan berskala yang dilakukan pemerintahan dunia.



Gambar 3. Perkembangan Rata-Rata PDB per Kapita Negara Terbersih dan Negara Terkorup (diolah dari data publikasi *World Bank dan Transparency International*, 2020)

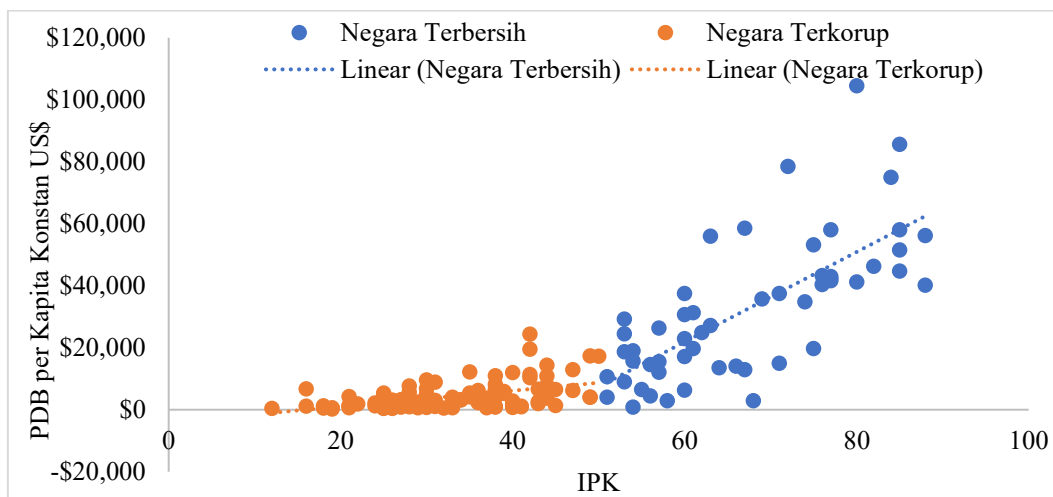
Laju pertumbuhan ekonomi pada negara terbersih cenderung lebih kecil dibandingkan negara terkorup. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 di mana negara terkorup cenderung mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar setiap tahunnya. Terjadi pergerakan yang fluktuatif baik pada negara terbersih maupun negara terkorup setiap tahunnya. Pergerakan fluktuatif tersebut disebabkan oleh naik turunnya variabel makro ekonomi lainnya yang membuat ketidakstabilan pada pertumbuhan laju ekonomi pada kedua kategori negara tersebut. Pada periode Covid-19, negara terkorup maupun terbersih mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar.



Gambar 4. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Negara Terbersih dan Negara Terkorup (data diolah dari publikasi *World Bank* dan *Transparency International*, 2020)

PDB per kapita dapat dipengaruhi berbagai faktor, faktor utama yang akan dibahas adalah korupsi yang diukur menggunakan IPK. IPK yang dikeluarkan *Transparency International* digunakan untuk mengukur sejauh mana kebersihan suatu negara terhadap praktik korupsi, dengan skala 0-50 dikategorikan sebagai negara terkorup dan 51-100 dikategorikan menjadi negara terbersih. Pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa negara terkorup cenderung memiliki tingkat PDB per kapita yang rendah dengan tingkat terendah dimiliki Negara Burundi yang hanya mencapai \$278,32 dengan nilai skor IPK yang hanya mencapai 20. Disusul Republik Afrika tengah dengan PDB per kapita \$364,08 dengan skor IPK 24, dan terakhir adalah Negara Madagaskar dengan PDB per kapita \$442,93 dan skor IPK hanya 25. Negara terkorup cenderung memiliki PDB yang angka rata ratanya

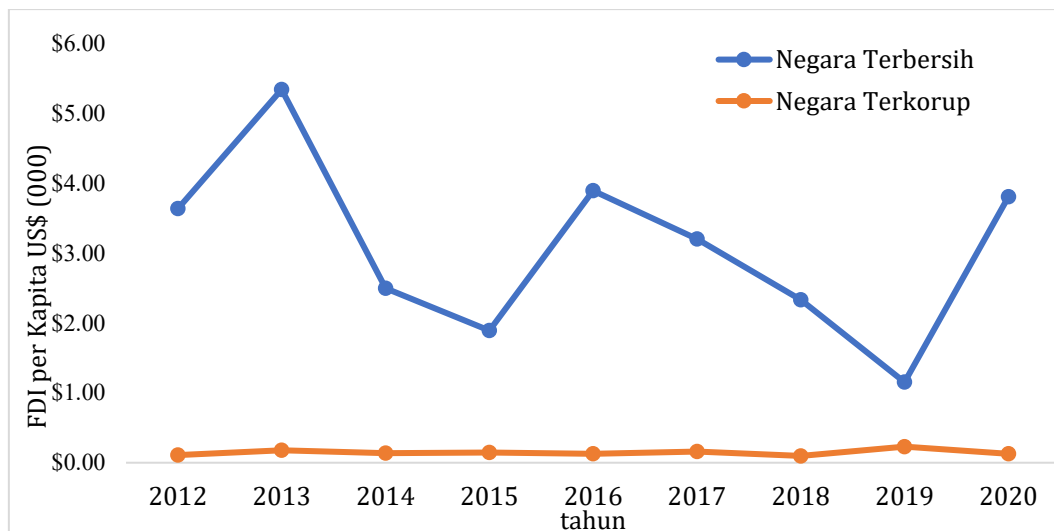
dibawah \$40.000. Di sisi lain, dilihat negara terbersih cenderung memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara terkorup. Hal tersebut dibuktikan dari PDB per kapita Negara Luxembourg yang mencapai angka \$104.526 dan memiliki IPK mencapai 80. Diikuti oleh Swiss dengan PDB per kapita sebesar \$85.682 dengan skor IPK 85, Irlandia dengan PDB per kapita sebesar 78.558,3 dengan skor IPK 72, Norwegia dengan PDB per kapita sebesar 75.017,2 dengan skor IPK 84, dan Amerika Serikat \$58.559,7 dengan skor IPK 67. Penjelasan diatas menggambarkan bahwa negara terbersih cenderung memiliki tingkat pendapat per kapita yang tinggi dibanding negara terkorup.



Gambar 5. Indikasi Hubungan IPK dan PDB per Kapita Tahun 2020 (diolah dari publikasi *World Bank* dan *Transparency International*, 2020)

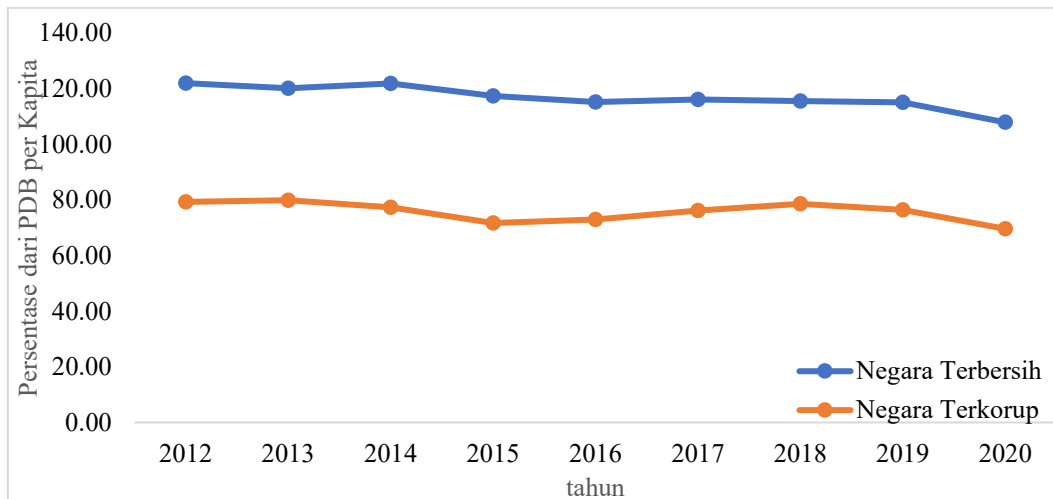
Selain korupsi, FDI juga mempengaruhi PDB per kapita setiap tahunnya. FDI merupakan salah satu sumber penting pembiayaan bagi setiap negara. FDI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan melalui penanaman modal, teknologi dan keterampilan manajerial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Zhu *et al.*, 2016). Setiap negara membutuhkan modal untuk membiayai proyek pembangunan. Salah satu cara untuk mendapatkan suntikan modal adalah dengan menarik FDI (Iamsiraroj, 2016). Jika dilihat pada Gambar 6 pada negara terbersih mempunyai grafik yang fluktuatif dan mengalami penurunan akibat adanya krisis global yang membuat para investor menarik uang mereka dan melemahkan pasar modal secara global. Di sisi sebaliknya, negara terkorup mempunyai grafik yang stagnan. Namun, ada hal menarik pada tahun 2020 saat pandemi melanda global. Tingkat FDI per kapita meningkat. Hal tersebut

dikarenakan, keputusan The Fed dalam meningkatkan tingkat suku bunga yang berdampak terhadap rasa percaya investor dalam menginvestasikan uang mereka pada bursa saham (Wagner, 2020). Pada tahun 2020, Negara Belanda menjadi negara dengan FDI negara terendah yakni sebesar \$-7569,74. Sementara itu, Negara Luxembourg menjadi negara dengan tingkat FDI tertinggi yakni sebesar \$88.556,77.



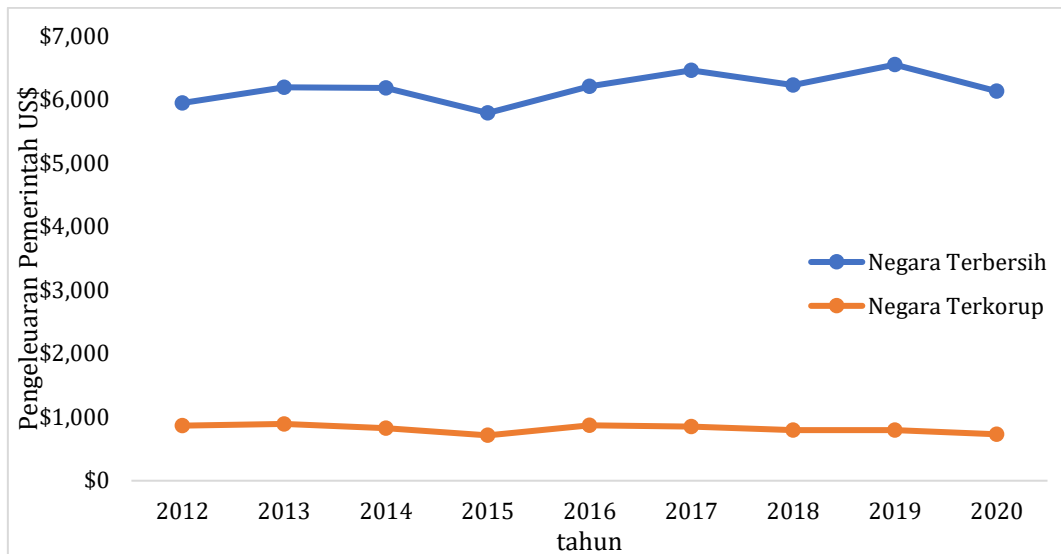
Gambar 6. Perkembangan Rata-Rata FDI per Kapita Tahun 2012-2020 (data diolah dari publikasi *World Bank* dan *Transparency International*, 2020)

Keterbukaan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi PDB per kapita suatu negara. Hal tersebut dikarenakan, keterbukaan ekonomi diambil menggunakan indikator berdasarkan persentase terhadap PDB per kapita. Keterbukaan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan tingkat PDB per kapita suatu negara (Hye *et al.*, 2016). Keterbukaan ekonomi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor yang berdampak langsung terhadap pendapatan suatu negara (Keho, 2017). Aliran modal asing dan perdagangan internasional sebagai representasi keterbukaan ekonomi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi (Ulasan 2015). Pada Gambar 7, keterbukaan ekonomi pada negara terbersih cenderung mengalami grafik yang cukup dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2017, berbeda dengan negara terkorup yang memiliki grafik yang cukup fluktuatif.



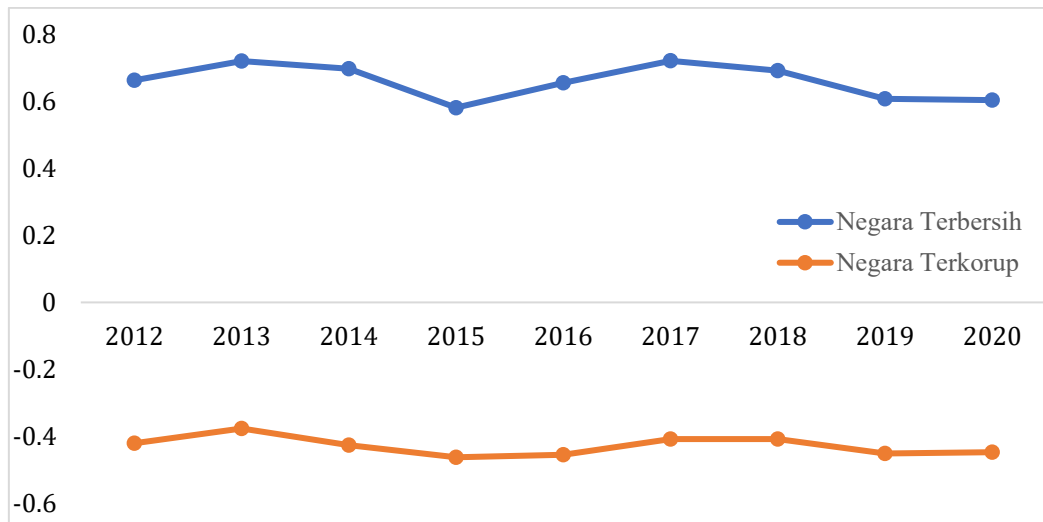
Gambar 7. Perkembangan Keterbukaan Ekonomi Tahun 2012-2020 (diolah dari publikasi data *World Bank* dan *Transparency International*, 2020)

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu komponen pengeluaran memiliki andil dalam mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara (Onifade *et al.*, 2020). Pengeluaran pemerintah adalah Pengeluaran umum pemerintah untuk pendidikan (saat ini, modal, dan transfer) dinyatakan sebagai persentase dari PDB. Pemerintahan umum biasanya mengacu pada pemerintah daerah, daerah dan pusat (Gurdal *et al.*, 2020). Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari pernyataan Mankiw (2007) yang menyatakan bahwa nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran setiap unit ekonomi dimana salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap perekonomian. Pada Gambar 8, pengeluaran pemerintah baik di negara terbersih maupun negara terkorup mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tahun 2018 grafik keduanya mengalami penurunan akibat adanya krisis global pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, pengeluaran pemerintah pada negara terbersih dan negara terkorup juga mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19.



Gambar 8. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah per Kapita Tahun 2012-2020 (diolah dari publikasi data *World Bank* dan *Transparency International*, 2020)

Regulasi yang dibuat pemerintah dapat meningkatkan perekonomian suatu negara (Adedoyin *et al.*, 2020). Regulasi yang tepat akan membuat peningkatan produktivitas dan meningkatkan pendapat suatu negara (Silberberger & Königer., 2016). Jika dilihat pada Gambar 9, negara terbersih cenderung memiliki nilai kualitas regulasi yang baik karena memiliki angka yang mendekati nilai maksimal. Negara Singapura menjadi negara dengan nilai regulasi yang baik yakni sebesar 2,43. Di sisi lain, Negara terkorup cenderung memiliki nilai kualitas regulasi yang buruk dimana kualitas regulasinya berada dibawah angka 0 bahkan cenderung mendekati angka -2,5. Negara Somalia memiliki kualitas regulasi terburuk dibanding negara lainnya yaitu -2,29 nilai regulasi.



Gambar 9. Perkembangan Kualitas Regulasi Tahun 2012-2020 (diolah dari data publikasi *World Bank* dan *Transparency International*, 2020)

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen korupsi pada 159 negara pada periode 2012-2020. Setelah dilakukan analisis deskriptif, peneliti perlu melakukan analisis data regresi panel, yang mana sebelum menentukan teknik analisis yang akan digunakan, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu.

Pada Tabel 3, dapat dilihat ringkasan variabel yang dimulai dari variabel PDB per kapita dimana terdapat kekurangan data yang hanya mencapai angka 1423 akibat keterbatasan data yang diunggah oleh bank dunia. Nilai rata rata variabel tersebut mencapai angka US\$13.969,16 dengan nilai minimum dipegang oleh Burundi dengan PDB per kapita sebesar US\$270,69 pada tahun 2020 dan nilai maksimum dipegang oleh Negara Luxembourg dengan PDB per kapita sebesar US\$108.526 pada Tahun 2019. Pada variabel IPK mempunyai angka observasi yang lengkap yaitu mencapai angka 1431 pada nilai observasi. Nilai rata rata pada variabel tersebut mencapai skala 44,26 untuk nilai minimum dengan nilai skala 8 pada Negara Somalia pada tahun 2012 dan nilai maksimum 92 dicapai oleh Negara Denmark pada tahun 2014. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah per kapita dengan observasi yang hanya mencapai 1338 akibat keterbatasan data pada lembaga survei. Nilai rata rata pada variabel berikut mencapai US\$6.217,58. Nilai minimum terjadi pada Negara Somalia dengan angka US\$21,75 pada tahun 2014, dan posisi maksimal dicapai oleh Negara Norway pada tahun 2020 yang mencapai US\$19.914,0. FDI per kapita mencapai nilai observasi yaitu mencapai 1421 dengan

rata rata mencapai US\$986,02. Nilai minimum di Negara Switzerland dengan nilai US\$-29.001,02 pada tahun 2015 dan nilai maksimum yang dicapai oleh Luxembourg yang mencapai angka US\$88.556,77 pada tahun 2020.

Keterbukaan ekonomi pada hanya mencapai 1403 observasi akibat keterbatasan data dengan nilai rata rata sebesar 89,22 persen dengan nilai minimum dicapai oleh Negara Sudan pada tahun 2020 dengan angka 0,78 persen dan nilai maksimum diraih Hongkong pada tahun 2013 dengan angka sebesar 442,62 persen. Variabel makro terakhir yaitu kualitas regulasi dengan kualitas regulasi yang lengkap dengan rata rata nilai skala mencapai angka 0,063. Negara Somalia pada tahun 2013 menjadi kualitas regulasi terendah dengan nilai skala -2,29 dan Negara Singapura pada tahun 2015 menjadi negara dengan skala 2,26. Untuk dc angka maksimum 1 dikarenakan sebagai variabel boneka untuk membuat perbedaan variabel dengan pandemi sedangkan 0 adalah periode tanpa pandemi. Sedangkan dn 1 untuk kategori negara terbersih dan dn 0 adalah negara terkorup.

Tabel 3. Ringkasan Statistik Variabel Penelitian

Variabel	Obs	Satuan Variabel	Rata-Rata	Simpangan Baku	Min	Maks
pdb_k	1423	US\$	13.969,16	18.846,27	270,69	108.526
ipk	1431	Skala 1-100	44,26	19,35	8	92
ge_k	1388	US\$	2565,49	3.666,81	21,75	19.914,03
fdi_k	1421	Ribu US\$	0,98	5,39	-29,00	88,55
to	1403	Persen	89,22	58,42	0,78	442,62
rq	1431	Skala -2,5 – 2,5	0,06	0,95	-2,29	2,26
dc	1431	0= tanpa pandemi, 1= dengan pandemi	0,11	0,31	0	1
dn	1431	0= negara terkorup, 1= negara terbersih	0,34	0,47	0	1

Pada analisis regresi data panel terdapat tiga pengujian yang perlu dilakukan untuk mengetahui teknik pemilihan pendekatan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian. Tiga uji tersebut, yaitu uji Chow yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara CEM atau FEM, selanjutnya uji Hausman yang digunakan untuk memilih model FEM atau REM dan uji LM yang digunakan untuk menentukan model terbaik di antara REM dan CEM. Berdasarkan *Chow test* dan *Hausman test*, maka dapat disimpulkan model estimasi analisis data panel yang terbaik dalam penelitian ini adalah pendekatan FEM. Hasil estimasi pada Tabel 4

menunjukkan bahwa interpretasi untuk *R-squared* atau koefisien determinasi pada model secara keseluruhan mencapai 0,6433. Nilai *R-square* bernilai 0,64, berarti 64% sebaran variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 36% tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen atau dapat dijelaskan oleh variabel diluar variabel independen (komponen error).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPK menunjukkan hasil signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji regresi, terlihat pada Tabel 4 didapatkan angka koefisien variabel IPK sebesar 0,00397 menunjukkan bahwa variabel IPK mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan semakin tinggi nilai IPK akan menambah lajunya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan 1 persen pada IPK akan meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,00397. Pada variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 0,00396. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00396. Hasil ini sesuai dengan Magdalena & Suhatman (2020) yang menyatakan bahwa pengaruh dari pengeluaran pemerintah akan membentuk modal yang akan membantu pembangunan sehingga dapat membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Untuk variabel FDI tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Hasan *et al.*, (2022) dan Asongu & Odhiambo (2020) yang menunjukkan bahwa FDI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada variabel keterbukaan ekonomi dengan nilai koefisien -0,000766, nilai koefisien tersebut dapat diartikan bahwa jika keterbukaan ekonomi mengalami penurunan sebesar satu persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000766. Pada variabel kualitas regulasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien mencapai 0,0541. Hasil ini sesuai dengan penelitian Murshed *et al.*, (2021), yang menyatakan bahwa kualitas regulasi yang dibuat pemerintah dalam mengelola sumber daya, akan menaikkan pertumbuhan jika kebijakan yang dibuat sangat efisien.

Variabel interaksi antara Covid-19 dan IPK maupun interaksi dengan *dummy* negara, IPK tidak menunjukkan adanya pengaruh. Pada variabel interaksi Covid-19 dengan pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan memiliki pengaruh, dan hasil serupa juga terjadi pada interaksi negara dengan pengeluaran pemerintah yang juga tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah variabel Covid-19 yang diinteraksikan kepada variabel. Hasil pada variabel tersebut memiliki pengaruh negatif signifikan pada taraf signifikan lima persen. Angka tersebut menandakan bahwa jika FDI mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Walaupun suatu negara lebih banyak mengeluarkan dananya untuk menginvestasikan uangnya kepada negara lain, hal tersebut tetap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika negara yang diinvestasikan berhasil meraih keuntungan. Hasil yang didapat sesuai dengan penelitian yang dilakukan Harjoto *et al.*, (2021). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa saat The Fed menaikkan suku bunga hal tersebut berdampak pada meningkatnya tingkat transaksi pada bursa modal sehingga membantu para perusahaan untuk bertahan dari pandemi agar tetap bisa menjalani laju produksi. Berbeda dengan interaksi Covid-19, pada saat FDI diinteraksikan oleh negara tidak mengalami pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel selanjutnya yang diinteraksikan dengan Covid-19 adalah keterbukaan ekonomi. Pada variabel tersebut tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lainnya, ketika variabel keterbukaan ekonomi diinteraksikan dengan negara mempunyai pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0,00122. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Kong *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi keterbukaan ekonomi akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pajak dan keuntungan atas ekspor dan impor yang dilakukan suatu negara. Hasil pada variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel terakhir yang diinteraksikan dengan Covid-19 dan negara adalah regulasi. Terlihat pada kedua hasil bahwa variabel tersebut menunjukkan pengaruh positif. Kualitas kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap negara baik tanpa pandemi maupun saat pandemi. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Saberi & Hamdan (2018) menyatakan bahwa kualitas pemerintah yang baik akan dapat

mempromosikan sektor swasta yang akan meningkatkan tingkat investasi asing sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel Independen	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (lnpdb k)
ipk	0,00397** (0,00162)
lnge_k	0,00396** (0,00165)
fdi_k	1,08e-07 (1,45e-07)
to	-0,000766* (0,000392)
rq	0,0541** (0,0223)
dcxipk	-0,0000571 (0,000610)
dnxipk	-0,00218 (0,00277)
dcxlnge_k	-0,00207 (0,00369)
dnxlnge_k	-1,98e-10 (9,94e-09)
dcxfdi_k	-3,87e-07** (1,89e-07)
dnxfd_i_k	-2,22e-07 (2,71e-07)
dcxto	0,000184 (0,000210)
dnxto	0,00122* (0,000674)
dcxrq	0,0281* (0,0162)
dnxrq	0,105** (0,0530)
konstan	8,482*** (0,0721)
<i>R-squared</i>	0,6433
F-Statistik	3.19
Observasi	1431
Negara	159
Pemilihan Model Terbaik	FEM
Uji Chow	FEM
Uji Hausman	FEM
Uji LM	REM

Catatan: dalam kurung adalah standar error; signifikansi taraf nyata ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Pada Tabel 5 terdapat lima variabel yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Interpretasi variabel IPK menunjukkan tidak ada perubahan pada negara terkorup maupun negara terbersih, baik tanpa pandemi maupun saat pandemi. IPK

berasosiasi baik dengan negara terbersih dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi IPK akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa penelitian yang mendukung hasil tersebut. Penelitian Kwadwo & Yusheng (2020) yang menemukan hasil bahwa korupsi dianggap sebagai roda penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih pemerintahan dari korupsi akan membuat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Hal serupa juga terjadi pada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tidak memiliki perbedaan baik tanpa pandemi maupun saat pandemi pada negara terbersih maupun negara terkorup. Pengeluaran pemerintah dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan, pengeluaran pemerintah khususnya dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM yang berdampak tumbuhnya perekonomian melalui hal tersebut. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Joshua (2019) yang menemukan juga pengaruh positif dari keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada FDI dapat dilihat bahwa variabel tersebut hanya mengalami pengaruh saat pandemi Covid-19. Hal menarik terjadi karena FDI berpengaruh negatif kepada pertumbuhan ekonomi pada taraf lima persen. Peningkatan FDI membuat penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Harjoto *et al.*, (2020). Peningkatan tingkat FDI pada saat pandemi Covid-19 merupakan imbas dari kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi resesi ekonomi. Keterbukaan ekonomi mempunyai pengaruh saat pandemi pada negara terkorup dan negara terbersih. Pada negara terkorup dapat dilihat bahwa tumbuhnya keterbukaan ekonomi membuat penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi sebaliknya, pada negara terbersih meningkatnya keterbukaan ekonomi sebanyak satu persen akan membuat tumbuhnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen. Tiwari *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa keterbukaan ekonomi akan membantu pertumbuhan ekonomi melalui pajak impor dan keuntungan penjualan pada ekspor yang berdampak langsung pada pendapatan negara. Kualitas regulasi merupakan satu-satunya variabel yang mempunyai interaksi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik tanpa masa pandemi maupun dengan pandemi pada negara terbersih dan negara terkorup. Pada negara terkorup nilai koefisien kualitas regulasi sebesar 0,0541 dan mengalami kenaikan pada periode Covid-19 menjadi 0,0322. Di sisi lainnya,

koefisien pada negara terbersih mengalami peningkatan tanpa pandemi dari 0,0541 menjadi 0,1591. Dengan terjadinya pandemi koefisien negara terbersih juga mengalami peningkatan menjadi 0,1872. Pada negara terbersih juga dapat dilihat bahwa kualitas regulasi jauh lebih tinggi dibanding negara terkorup. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi negara terbersih jauh lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini didukung oleh penelitian Grochová (2014) yang menjelaskan bahwa kualitas regulasi dapat memperbaiki pertumbuhan jika membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan ekonomi yang dialami suatu negara.

Tabel 5. Hasil Estimasi Periode Tanpa dan Dengan Covid-19 pada Negara Terbersih dan Negara Terkorup

Variabel Independen	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (lnpdb_k)			
	Negara Terkorup (dn=0)		Negara Terbersih (dn=1)	
	tanpa pandemi (dc=0)	dengan pandemi (dc=1)	tanpa pandemi (dc=0)	dengan pandemi (dc=1)
Ip _k	0,00397	0,00397	0,00397	0,0397
lnge _k	0,00396	0,00396	0,00396	0,00396
fdi _k	-	-2,79e-07	-	-4,92e07
to	-0,000766	-0,000766	0,000454	0,000454
rq	0,0541	0,0322	0,1591	0,1872

4 PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa korupsi dianggap sebagai *sand the wheels*. Temuan ini mendukung pendapat dari Kurer (1993), Bardhan (1997), Kéïta dan Laurila (2021), Mauro et al., (2019), (Shittu et al., 2018) dan Zakharov (2019), yang menyatakan bahwa korupsi dianggap sebagai penghambat roda karena korupsi berpengaruh buruk terhadap negara negara yang digolongkan sebagai negara terkorup didunia. Korupsi menurunkan tingkat kepercayaan investor, menurunkan tingkat produktifitas, dan merugikan negara dengan pajak yang digelapkan. Selain korupsi terjadinya Covid-19 juga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan, deglobalisasi yang dilakukan menghambat kegiatan perekonomian dan menyebabkan penurunan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Terjadinya resesi akibat Covid-19, tidak menurunkan angka korupsi baik negara berkembang maupun negara maju melainkan di seluruh dunia. Dengan demikian banyak negara yang mulai menangani korupsi dengan membentuk lembaga pemberantas korupsi seperti *Transparency International* yang merupakan lembaga pengawas korupsi dunia. Pengukuran yang dilakukan oleh Transparency International dari IPK dengan skala 1-100, dimana skala 0-50 merupakan negara terkorup dan skala 51-100 merupakan negara terbersih. Pada tahun 2020, transparency international menetapkan 5 negara terbersih yaitu, Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Singapura dan Swedia. Sedangkan untuk negara terkorup, yaitu Somalia, Sudan, Haiti, Congo dan Burundis.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat keterkaitan Covid-19, Korupsi dan Pertumbuhan ekonomi dalam negara terkorup dan negara terbersih. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat diberikan kesimpulan bahwa IPK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara korupsi suatu negara semakin bersih suatu negara, akan tetapi tidak ada perbedaan perbedaan negara terkorup maupun negara terbersih baik tanpa pandemi Covid-19 dengan adanya pandemi Covid-19. Hasil tersebut menandakan bahwa setiap kenaikan nilai IPK akan menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena, tingkat korupsi yang rendah akan membuat perekonomian berjalan lebih baik

karena anggaran akan tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Hasil regresi ini juga sesuai dengan data yang diperoleh dari *Transparency International* dan *World Bank* dimana data tersebut memperlihatkan nilai pertumbuhan yang tinggi mempunyai skor IPK yang tinggi pula. Hasil tersebut membuktikan teori korupsi yang dianggap sebagai *sand the wheels*. Korupsi membuat para investor tidak percaya untuk menginvestasikan uang mereka sehingga mempersulit pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga serta menurunkan tingkat produktivitas dan penurunan pendapatan negara dari pajak yang digelapkan.

Variabel pengeluaran pemerintah per kapita (ge_k) berpengaruh positif dan signifikan, sama seperti (ipk) bahwa pengeluaran pemerintah tidak ada perbedaan perbedaan baik di negara terkorup maupun negara terbersih baik tanpa pandemi Covid-19 dengan adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya variabel FDI tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai FDI terus berfluktuasi disetiap tahunnya. Adanya persaingan antar negara untuk menarik FDI, mendorong tiap negara untuk lebih meningkatkan iklim investasi yang tentunya hal tersebut didukung oleh determinan dan nondeterminan ekonomi yang lebih kondusif. Dengan demikian, integrasi perekonomian dunia akan mendorong setiap negara untuk menciptakan aktivitas ekonomi berdasarkan pasar. Selanjutnya, variabel keterbukaan ekonomi berpengaruh positif. Ketika semakin tinggi keterbukaan ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah baik tanpa maupun dengan Covid-19. Kualitas pemerintah yang baik akan meningkatkan investasi asing yang mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Variabel kualitas regulasi menjadi satu-satunya variabel yang mempunyai interaksi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, baik itu tanpa maupun dengan Covid-19. Hasil uji pada negara terbersih dan negara terkorup, variabel kualitas regulasi pada negara terbersih jauh lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kualitas regulasi yang baik akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara dengan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A Adedoyin, F. F., Gumede, M. I., Bekun, F. V., Etokakpan, M. U., & Balsalobre-Lorente, D. (2020). Modelling coal rent, economic growth and CO2 emissions: does regulatory quality matter in BRICS economies?. *Science of the Total Environment*, 710, 136284. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.136284.
- Ahmed, Z., Wang, Z., Mahmood, F., Hafeez, M., dan Ali, N. (2019). Does globalization increase the ecological footprint? Empirical evidence from Malaysia. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(18), 18565-18582. DOI: 10.1007/s11356-019-05224-9.
- Artello, K., & Albanese, J. S. (2020). Rising to the Surface: The Detection of Public Corruption. *Actual Probs. Econ. & L.*, 852. DOI: 10.21202/1993-047X.142020.4.852-869.
- Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2020). Foreign direct investment, information technology and economic growth dynamics in Sub-Saharan Africa. *Telecommunications Policy*, 44(1), 101838. DOI: 10.1016/j.telpol.2019.101838.
- Baldwin, R., dan Mauro, B. W. (2020). Economics in the time of COVID-19. *Introduction* (pp. 1-30). London: VOX Economic; Centre for Economic Policy Research. ISBN: 978-1-912179-28-2.
- Bardhan, P. (1997). Corruption and development: a review of issues. *Journal of economic literature*, 35(3), 1320-1346.
- Bologna, J., & Ross, A. (2015). Corruption and entrepreneurship: evidence from Brazilian municipalities. *Public Choice*, 165(1) 59-77. DOI: 10.1007/s11127-015-0292-5.
- Bussmann, K. D., Niemeczek, A., & Vockrodt, M. (2018). Company culture and prevention of corruption in Germany, China and Russia. *European Journal of Criminology*, 15(3), 255-277. DOI: 10.1177/1477370817731058.
- d'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2016). Corruption and growth in Africa. *European Journal of Political Economy*, 43, 71-88. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2016.03.002.
- Deyshappriy, N. P. (2015). Do corruption and peace affect economic growth? Evidences from the cross-country analysis. *Journal of Social and Economic Development*, 17(2), 135-147. DOI: 10.1007/s40847-015-0016-1.
- Denisova-Schmidt, E. (2020). Introduction: Corruption in higher education: Global challenges and responses. *Introduction* (pp. 1-12). Leiden: Koninklijke Brill NV. DOI: [10.1163/9789004433885_001](https://doi.org/10.1163/9789004433885_001). ISBN: 9789004433885.
- Desweni, S. P. (2017). Analisis investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 3(5).
- Grochová, L. I. (2014). Regulatory quality and sustainable economic development. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 62, 136. DOI: 10.11118/actaun201462061301.
- Gurdal, T., Aydin, M., & Inal, V. (2021). The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches. *Economic Change and Restructuring*, 54(2), 305-337. DOI: 10.1007/s10644-020-09280-x.

- Habibov, N., Afandi, E., & Cheung, A. (2017). Sand or grease? Corruption-institutional trust nexus in post-Soviet countries. *Journal of Eurasian Studies*, 8(2), 172-184. DOI: 10.1016/j.euras.2017.05.001.
- Harjoto, M. A., Rossi, F., & Paglia, J. K. (2021). COVID-19: Stock market reactions to the shock and the stimulus. *Applied Economics Letters*, 28(10), 795-801. DOI: 10.1080/13504851.2020.1781767.
- Hasan, M. A., Nahiduzzaman, K. M., Aldosary, A. S., Hewage, K., & Sadiq, R. (2022). Nexus of economic growth, energy consumption, FDI and emissions: a tale of Bangladesh. *Environment, Development and Sustainability*, 24(5), 6327-6348. DOI: 10.1007/s10668-021-01704-6.
- Huang, C. J. (2016). Is corruption bad for economic growth? Evidence from AsiaPacific countries. *The North American Journal of Economics and Finance*, 35, 247-256. DOI: [10.1016/j.najef.2015.10.013](https://doi.org/10.1016/j.najef.2015.10.013).
- Huntington, S.P. (1968). *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press.
- Iamsiraroj, S. (2016). The foreign direct investment–economic growth nexus. *International Review of Economics & Finance*, 42, 116-133. DOI: 10.1016/j.iref.2015.10.044.
- Joshua, U. (2019). An ARDL approach to the government expenditure and economic growth nexus in Nigeria. In *An ARDL approach to the government expenditure and economic growth Nexus in Nigeria: Joshua, Udi*.
- Keho, Y. (2017). The impact of trade openness on economic growth: The case of Cote d'Ivoire. *Cogent Economics & Finance*, 5(1), 1332820. DOI: 10.1080/23322039.2017.1332820.
- Kéïta, K., & Laurila, H. (2021). Corruption and Tax Burden: What Is the Joint Effect on Total Factor Productivity? *Economies*, 9(1), 26. DOI: 10.3390/economies9010026.
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120737. DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120737.
- Kong, Q., Peng, D., Ni, Y., Jiang, X., & Wang, Z. (2021). Trade openness and economic growth quality of China: Empirical analysis using ARDL model. *Finance Research Letters*, 38, 101488. DOI: 10.1016/j.frl.2020.101488.
- Kurer, O. (1993). Clientelism, corruption, and the allocation of resources. *Public Choice*, 77(2), 259-273. DOI: 10.1007/BF01047869.
- Kwadwo, A. S., Yusheng, K., Musah, M., Mary, D., & Hamza, K. (2020). Does corruption grease or sand the wheels of economic growth in Ghana? An ARDL bounds test. *The Economics and Finance Letters*, 7(2), 162-178. DOI: 10.18488/journal.29.2020.72.162.178.
- Magdalena, S., & Suhatman, R. (2020). The Effect of Government Expenditures, Domestic Investment, Foreign Investment to the Economic Growth of Primary Sector in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 1692-1703. DOI: 10.33258/birci.v3i3.1101.
- Mankiw, N. G. 2007. *Makroekonomi* (6th ed.). Jakarta: Erlangga.

- Malanski, L. K., & Póvoa, A. C. S. (2021). Economic growth and corruption in emerging markets: Does economic freedom matter? *International Economics*, 166, 58-70. DOI: 10.1016/j.inteco.2021.02.001.
- Mauro, P., Medas, P. A., & Fournier, J. M. (2019). The Cost of corruption: Graft results in lost tax revenue, but it also takes a social toll. *Finance & Development*, 56(3) 1-4. DOI: 10.5089/9781498316040.022.
- Murshed, M., Rahman, M., Alam, M. S., Ahmad, P., & Dagar, V. (2021). The nexus between environmental regulations, economic growth, and environmental sustainability: linking environmental patents to ecological footprint reduction in South Asia. *Science and Pollution Research*, Environmental 28(36), 49967-49988. DOI: 10.1007/s11356-021-13381-z.
- Onifade, S. T., Çevik, S., Erdoğan, S., Asongu, S., & Bekun, F. V. (2020). An empirical retrospect of the impacts of government expenditures on economic growth: new evidence from the Nigerian economy. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 1-13. DOI: 10.1186/s40008-020-0186-7.
- Rode, M., & de Viteri, A. S. (2018). Expressive attitudes to compensation: The case of globalization. *European Journal of Political Economy*, 54, 42-55. DOI: [10.1016/j.ejpoleco.2018.05.007](https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.05.007).
- Popov, A. (2018). Evidence on finance and economic growth. *Handbook of finance and development*, 63-104. DOI: 10.4337/9781785360510.00009.
- Saberi, M., & Hamdan, A. (2018). The moderating role of governmental support in the relationship between entrepreneurship and economic growth: A study on the GCC countries. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*. DOI: 10.1108/JEEE-10-2017-0072.
- Shahbaz, M., Mallick, H., Mahalik, M. K., & Hammoudeh, S. (2018). Is globalization detrimental to financial development? Further evidence from a very large emerging economy with significant orientation towards policies. *Applied Economics*, 50(6), 574-595. DOI: [10.1080/00036846.2017.1324615](https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1324615).
- Sharma, C., & Mitra, A. (2019). Corruption, governance and firm performance: Evidence from Indian enterprises. *Journal of Policy Modeling*, 37(5), 835-851. DOI: 10.1002/jid.3433.
- Shittu, W.O., Hassan, S. and Nawaz, M.A. (2018), The nexus between external debt, corruption and economic growth: evidence from five SSA countries, African Journal of Economic and Management Studies, 9(3) 319-334. DOI: 10.1108/AJEMS-07-2017-0171.
- Silberberger, M., & Königer, J. (2016). Regulation, trade and economic growth. *Economic Systems*, 40(2), 308-322.
- Stiglitz, J. E. (2007). Making globalization work. WW Norton & Company.
- Son, T. H., Liem, N. T., & Khuong, N. V. (2020). Corruption, nonperforming loans, and economic growth: International evidence. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735691. DOI: 10.1080/23311975.2020.1735691.
- Surico, P., & Galeotti, A. (2020). The economics of a pandemic: the case of Covid-19. *Wheeler institute for business and development, LBS. London: London business school*.
- Tiwari, A. K., Nasreen, S., & Anwar, M. A. (2022). Impact of equity market development on renewable energy consumption: Do the role of FDI, trade

- openness and economic growth matter in Asian economies?. *Journal of Cleaner Production*, 334, 130244. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130244.
- Transparency international. (2021). Corruption perception index. *In Corruption Perception Index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>. Diakses pada 16/04/2022.
- Tsanana, E., Chapsa, X., & Katrakilidis, C. (2016). Is growth corrupted or bureaucratic? Panel evidence from the enlarged EU. *Applied Economics*, 48(33), 3131-3147. DOI: [10.1080/00036846.2015.1136395](https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1136395).
- Ulaşan, B. (2015). Trade openness and economic growth: panel evidence. *Applied Economics Letters*, 22(2), 163-167. DOI: 10.1080/00036840600749490.
- Urbano, D., Aparicio, S., & Audretsch, D. (2019). Twenty-five years of research on institutions, entrepreneurship, and economic growth: what has been learned? *Small Business Economics*, 53(1), 21-49. DOI: 10.1007/s11187-018-0038-0.
- Wang, L. (2016). The impacts of anti-corruption on economic growth in China. *Modern Economy*, 7(2), 109-117. DOI: [10.4236/me.2016.72013](https://doi.org/10.4236/me.2016.72013).
- Worldometers. (2022). Reported cases and deaths by country or territory. *Corona Virus Statistics*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>. Diakses pada 18/12/2022.
- Van den Berg, H. (2016). *Economic growth and development*. World Scientific Publishing Company.
- Veresha, R. (2018). Corruption-related offences: Articulation of pervasive prevention mechanisms. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4), 1-12. DOI:
- Wagner, A. F. (2020). What the stock market tells us about the post-COVID-19 world. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 440-440.
- Zakharov, N. (2019). Does corruption hinder investment? Evidence from Russian regions. *European Journal of Political Economy*, 56, 39-61. 10.1016/j.ejpoleco.2018.06.005.
- Zhu, H., Duan, L., Guo, Y., & Yu, K. (2016). The effects of FDI, economic growth and energy consumption on carbon emissions in ASEAN-5: evidence from panel quantile regression. *Economic Modelling*, 58, 237-248. DOI: 10.1016/j.econmod.2016.05.003.